



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N N G A D A

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta Telp. 0384 – 21215

B A J A W A

PENGUMUMAN

NOMOR: 813/BKPSDM/53/07/2025

Berasal Dari : Bupati Ngada
Ditujukan Kepada : Para Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 2 Juli 2025
Perihal : Usul Penetapan NI PPPK Tahap 2 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

ISI PENGUMUMAN

Dalam rangka Usul Penetapan NI PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 secara Elektronik, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sejak tanggal 1 Juli s/d 30 Juli 2025 serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 melalui <https://sscn.bkn.go.id>.
2. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Pelamar, yaitu:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai (materai 10.000);
 - b. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai (materai 10.000) (format terlampir);
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah (RSUD) Bajawa;
 - e. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (RSUD Bajawa);
 - f. Dokumen kelengkapan lainnya sesuai permintaan pada sistem SSCASN.
3. Pengurusan Surat Keterangan Kesehatan mengikuti Jadwal yang disiapkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Bajawa;
4. Pengurusan SKCK mengikuti Jadwal yang disiapkan oleh Kepolisian Resort Ngada;
5. Selain diunggah pada aplikasi <https://sscn.bkn.go.id>, peserta juga menyampaikan kelengkapan dokumen ke Bupati Ngada, cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada setiap hari kerja sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.

6. Dokumen yang disampaikan ke BKPSDM:
- a. Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm, berpakaian formal (Kemeja Putih Berkerah) dengan latar belakang berwarna merah 1 (satu) lembar;
 - b. Foto Copi Ijasah dan Transkrip Nilai;
 - c. Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai (materai 10.000);
 - d. Asli Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai (materai 10.000) (format terlampir);
 - e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah (RSUD Bajawa);
 - g. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (RSUD Bajawa);


Bupati Ngada
Pj. Sekretaris Daerah
Yohanes Capistrano Watu Ngebu, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197103281992031011

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	
Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan, Mutasi dan Dokumentasi	

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Bupati Ngada di Bajawa sebagai laporan;
- Wakil Bupati Ngada di Bajawa sebagai laporan.
-

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA:

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, CALON PPPK ATAU PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, CALON PPPK, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

BAJAWA , JANUARI 2024
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI 10000

.....